

INISIASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

(The Initiation of Civic Education As a Medium for Character Education among Children with Special Needs)

Nurul Huda^a, Aulia Sholichah Iman Nur Chotimah^b

^{ab}Universitas Pendidikan Indonesia , Indonesia
E-mail : nurulhuda93@student.upi.edu

Abstrak: Pendidikan karakter merupakan hal yang perlu dilakukan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami berbagai persoalan, seperti degradasi moral yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan ini juga tidak jarang dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti pencurian, merusak dan pelanggaran seksual. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter merupakan upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*). Warga negara yang baik ditandai dengan kemampuan penalaran moral untuk bersikap, yaitu *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral behavior*. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi garda utama dalam membentuk karakter warga negara yang baik.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Abstract: Character education is one of the most important things that Indonesian citizen have to do to maintain their existence. Recently, Indonesian citizen deals with various problems, one of them is moral degradation which can be seen from the value deviations of Pancasila. Children with Special Needs are also those who experience this kind of deviations, such as thievery, and sexual abuse. Civic education as a medium of character education becomes a pedagogical effort to shape a good citizen. A good citizen is characterised by the ability to do moral reasoning which means moral knowing, moral feeling and moral behavior. Character education integrated in civic education is hoped to be the main featon to help people to be good citizen.

Keywords : Civic Education, Character Education, Children with Special Needs

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dilaterbelakangi beragam budaya, bahasa, agama, suku dan berbagai kondisi warga negaranya. Hal ini yang menjadikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan diberbagai bidang dan tidak terkecuali dibidang pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam membentuk watak dan kehidupan warga negara yang potensial, dan bangsa yang bermartabat dan beradab berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia, maka pandangan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang manusia diberikan amanat oleh Tuhan berupa anak-anak yang “normal”, namun ada juga berupa anak-anak yang memiliki kekhususan akibat kelainan fisik, intelektual, kelainan sosial, maupun emosional. Akibat kelainan tersebut pastilah timbul berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan karakter Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Permasalahan tersebut akan timbul jika tidak

diarahkan dengan baik, dan tidak dibekali dengan kemampuan pertimbangan moral yang baik.

Periode masa kanak-kanak pertengahan sering disebut dengan periode usia sekolah, yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan dan hubungan anak dengan orang lain. Anak mulai bergabung ke dalam kelompok sebaya, yang menjadi hubungan dekat pertama di luar kelompok keluarga. Secara normal tumbuh kembang anak usia sekolah dalam Wong et al (dalam Rahmawati, 2011) dapat dilihat dalam perkembangan moralnya, anak mengalami perubahan egosentris ke pola berpikir logis dan mulai mengalami perkembangan nurani serta standar moral. Pengertian moralitas anak ditentukan oleh aturan-aturan dan tata tertib dari luar. Seperti keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Hubungan dan kontak sosial anak dengan figur orang dewasa yang memegang otoritas mempengaruhi pengertian benar-salah pada anak. Sumber stress pada anak usia sekolah adalah harapan orang tua dan guru yang terlalu tinggi, persaingan dengan teman sebaya, rasa malu, agresi, idola persahabatan, kritikan terhadap diri sendiri, kekuasaan orang tua, kesepian pemberontakan, kematangan organ seks dan masalah seks yang menekan. Sehingga terkadang hal tersebut memicu tingkat stress pada anak yang antara lain ditandai

dengan ciri-ciri nyeri lambung, sakit kepala, insomnia, mengompol, perubahan pola makan, agresif, dan malas berpartisipasi. Hal tersebut pun terjadi pada anak berkebutuhan khusus (ABK), Selain itu, penyimpangan-penyimpangan juga tidak jarang dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti pencurian, merusak dan pelanggaran seksual.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter merupakan upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*). Warga negara yang baik ditandai dengan kemampuan penalaran moral untuk bersikap, yaitu *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral behavior*. Didalam Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan karakter harus menjadi fokus utama dan karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan juga dampak pengiring (*nurturant effects*) (Samani dan Hariyanto, 2012). Maka dari itu, dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan adanya *transfer of knowledge* akan melahirkan sikap yang baik dan berkarakter dalam diri Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sehingga dengan sikap yang baik dan berkarakter inilah Anak Berkebutuhan Khusus akan mampu bersaing, dan bahkan dapat mengungguli anak-anak normal lainnya. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi garda utama dalam membentuk karakter warga negara yang baik untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mana metode ini mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang dikaji. Selanjutnya menggunakan *study literature* dalam pencarian data-data yang relevan dan terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter, serta dilakukan analisa lebih dalam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKn Sebagai Pendidikan Karakter : *Moral knowing, Moral feeling and Moral behaviour*

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2012: 22). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Budimansyah, 2010: 5).

Karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter merupakan

dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh Pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang multi suku, multi ras, multi bahasa, multi adat, dan tradisi. Untuk tetap menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kesadaran untuk menjunjung tinggi *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan suatu *condition sine quanon*, syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi (Samani dan Hariyanto, 2012: 22)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter didefinisikan sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang mulia (*good character*) dari siswa dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan Tuhannya. Sebagai pendidikan karakter, PKn suatu proses pembelajaran yang memberdayakan siswa dan orang dewasa di dalam komunitas sekolah untuk memahami, peduli, dan berbuat berlandaskan nilai-nilai etik seperti *respect*, keadilan, kebajikan warga (*civic virtue*) dan kewarganegaraan (*citizenship*), dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain (Samani dan Hariyanto, 2012: 44).

Karakter yang baik (*good character*) terdiri atas proses-proses yang meliputi, tahu mana yang baik (*knowing the good*), keinginan melakukan yang baik (*desiring the good*), dan melakukan yang baik (*doing the good*). Kecuali itu, karakter yang baik juga harus ditunjang oleh kebiasaan pikir (*habit of mind*), kebiasaan kalbu (*habit of the heart*), dan kebiasaan tindakan (*habit of action*). Selanjutnya juga dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa konfigurasi karakter dalam konteks realitas psikologis dan juga sosial-kultural tersebut dikategorikan menjadi: olah hati (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Samani dan Hariyanto, 2012: 50).

Dalam kaitan implementasi nilai-nilai dan proses-proses tersebut diatas, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan memfasilitasi mereka untuk menjadi orang yang memiliki kualitas moral, kewarganegaraan, kebaikan, kesantunan, rasa hormat, kesehatan, sikap kritis, keberhasilan, kebiasaan, insan yang kehadirannya dapat diterima dalam masyarakat, dan kepatuhan (Samani dan Hariyanto, 2012: 50). Menurut Lickona (1992) didalam Budimansyah (2010: 150) menjabarkan tiga dimensi nilai moral yang perlu dikembangkan dalam rangka pendidikan kewarganegaraan adalah karakter yang baik (*good character*) yang memiliki keterkaitan baik secara substantif maupun fungsional. Tiga dimensi nilai moral tersebut sebagai berikut:

1. Wawasan Moral (*Moral Knowing*) yang mencakup:
 - a) Kesadaran moral (*Moral awareness*)
 - b) Wawasan nilai moral (*Knowing moral values*)

- c) Kemampuan mengambil pandangan orang lain (*Perspective taking*)
 - d) Penalaran moral (*Moral reasoning*)
 - e) Mengambil keputusan (*Decision-making*)
 - f) Pemahaman diri sendiri (*Self-knowledge*)
2. Perasaan Moral (*Moral Feeling*) yang mencakup:
- a) Kata hati atau nurani (*Conscience*)
 - b) Harapan diri sendiri (*Self-esteem*)
 - c) Merasakan diri orang lain (*Empathy*)
 - d) Cinta kebaikan (*Loving the good*)
 - e) Kontrol diri (*Self-control*)
 - f) Merasakan diri sendiri (*Humility*)
3. Perilaku Moral (*Moral Action/ Behavior*) yang mencakup:
- a) Kompetensi (*Competence*)
 - b) Kemauan (*Will*)
 - c) Kebiasaan (*Habit*)

Selain itu, pendidikan karakter atau *character education* digunakan sebagai *umbrella term* untuk mendeskripsikan "... the teaching of children in a manner that will help them develop variously as moral, civic, good, mannered, behaved, non bullying, healthy, critical, successful, traditional, compliant and/or socially-acceptable beings." Dalam konteks itu diberbagai sumber kepustakaan dikenal beberapa nomenkatur/ jargon pendidikan seperti *social and emotional learning, moral reasoning/ cognitive development, life skills education, health education, violent prevention, critical thinking, ethical reasoning, and conflict resolution and mediation*. Dengan kata lain pendidikan karakter yang terintegrasi didalam pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. (Elkind dan Sweet; Winataputra, 2012).

Peran PKn Sebagai Pendidikan Karakter Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak adalah warga negara hipotetik, yakni warga negara yang "belum jadi" karena masih harus dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007), dan tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk karakter anak berkebutuhan khusus sangat besar sekali. Karena hal ini telah termaktub didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu, didalam Budimansyah (2010: 50) komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Sehingga, jika dicermati 5 (lima) dari 8 (delapan) potensi peserta didik yang ingin dikembangkan terkait erat dengan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Dalam kaitan itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/ Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab (Samani dan Hariyanto, 2012: 9).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diharapkan menjadi suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai melalui proses intervensi dan habituasi. Apa yang dimaksud dengan proses intervensi? Intervensi adalah proses pendidikan karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran (*learning and instruction*) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan berbagai kegiatan yang terstruktur (*structured learning experiences*). Sedangkan habituasi merupakan proses penciptaan aneka situasi dan kondisi yang berisi aneka penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, dirumahnya, dilingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai dan menjadi perangkat nilai yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi melalui olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Sebagai contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan berperilaku jujur (Budimansyah, 2010: 63).

Sehingga dalam peranannya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah, 2008: 180). Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas,

partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Tantangan PKn Sebagai Pendidikan Karakter Untuk ABK

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah bagaimana PKn dapat diajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran PKn merupakan pembelajaran kewarganegaraan yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pihak sekolah untuk memberi pembelajaran kewarganegaraan kepada siswa sesuai dengan keadaan yang dimiliki siswanya, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu ABK berhak mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana yang didapatkan oleh anak normal pada umumnya.

Pendidikan sendiri merupakan bentuk bimbingan dari orang dewasa terhadap perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak dapat secara mandiri melaksanakan tugas hidupnya sendiri (mandiri) tanpa bantuan orang lain. Pendidikan merupakan hal awal yang sangat penting untuk kehidupan anak. Pendidikan merupakan awal dimana seorang anak belajar membaca, melatih kemampuan berhitung dan berpikir dengan baik. Saat ini pendidikan di bangku sekolah dapat dinikmati dan ditempuh oleh siapapun dari berbagai kalangan dan golongan manapun. Berbagai sekolah didirikan sebagai tempat atau sarana pendidikan bagi anak-anak yang ingin memperoleh pendidikan, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimaknai dengan anak-anak yang menyandang ketunaan dan berbakat. Dalam perkembangannya, konsep ketunaan kini berubah menjadi berkelainan (*exception*) atau luar biasa. Konsep dari ketunaan itu sendiri berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan hanya berkenaan dengan kecacatan, sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang dikaruniai keunggulan.

Hak terhadap anak berkebutuhan khusus sendiri, telah diatur pada UU No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 1 yang menegaskan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa". Negara juga menjamin hak bersekolah ABK pada sekolah regular maupun khusus. Seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Dalam kegiatan pembelajaran PKn ada bermacam hambatan yang dialami guru, tidak hanya dari keterbatasan yang dimiliki siswa atau sarana prasarana saja dari pihak guru pun terdapat hambatan yang terkadang berpengaruh pada kemajuan siswa. Latar belakang lulusan bukan dari jurusan PKn membuat guru mengalami kesulitan ketika menyampaikan materi lebih mendalam. Karena pada dasarnya guru lebih menguasai manajemen kelas dan ketunaan siswa, sedang dalam penguasaan materi yang lebih mendalam guru kurang menguasai. Guru memang hanya menjelaskan materi secara dasar saja. Penjelasan yang diberikan guru terhadap siswa terkesan singkat. Meskipun siswa yang diajar adalah anak dengan kelainan lambat berfikir. Tidak seharusnya guru hanya menjelaskan secara singkat, tapi kembali lagi pada latar belakang pendidikan guru yang dasarnya memang kurang menguasai materi secara rinci dan mendalam. Disini tentu akan berdampak pada kemajuan akademik siswa, karena siswa hanya mendapat informasi yang sedikit dari apa yang dipelajari.

Pembelajaran PKn untuk ABK harus disesuaikan dengan kondisi ABK, pembelajaran secara individual dan intens terhadap ABK akan lebih dapat dimengerti, kemudian yang harus ditekankan adalah pembelajaran menggunakan dilema moral. Agar anak-anak berkebutuhan khusus lebih paham dengan tujuan dari PKn dan pembelajaran materi secara real dapat melalui video, gambar untuk menyajikan dilema moral yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter merupakan upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*). Sebagai pendidikan karakter, PKn suatu proses pembelajaran yang memberdayakan siswa dan orang dewasa di dalam komunitas sekolah untuk memahami, peduli, dan berbuat berlandaskan nilai-nilai etik seperti *respect*, keadilan, kebajikan warga (*civic virtue*) dan kewarganegaraan (*citizenship*), dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan karakter untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”.

Indonesia yang sedang mengalami degradasi moral yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan ini juga tidak jarang dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti pencurian, merusak dan pelanggaran seksual. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk membentuk karakter Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan melalui kegiatan pembelajaran PKn.

Namun dalam kegiatan pembelajaran Pkn ada bermacam hambatan yang dialami guru, tidak hanya dari keterbatasan yang dimiliki siswa atau sarana prasana saja dari pihak guru pun terdapat hambatan yang terkadang berpengaruh pada kemajuan siswa.

Saran

Bagi lembaga pendidikan, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah yang menerapkan program Sekolah Inklusi diharapkan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus. Karena melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Selain itu, sebagai pendidik, guru hendaknya dapat memilih metode mengajar yang tepat dan cermat, sehingga proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tercapai secara optimal dan tentunya sesuai dengan kondisi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Delphie, Bandi. 2010. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung: PT Refika Aditama
- Lickona, Thomas. 2015. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Akasara
- Mulyana, E. 2014. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nucci, Larry P dan Darcia Narvaez. 2008. *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*. Bandung: Nusa Media
- Ormrod, J E. 2009. *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*. Jakarta: Erlangga
- Rahmawati, Dian. 2011. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan Perawatan Diri Anak Tuna Grahita di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Tesis. Universtas Indonesia
- Samani, Muchlas. dan Hariyanto. 2012. *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Samsuri. 2012. *Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Surakarta: Pustaka Hanif
- Winataputra, U.S. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis*. Bandung: Widya Aksara Press

